

Abstrak

Perbuatan hukum hibah mengenai tanah yang dilakukan orang-perorangan dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Pada hibah terdapat unsur tidak dapat ditarik kembali, akan hal tersebut tetapi bukan suatu hal yang mutlak karena dalam keadaan tertentu unsur tidak dapat ditarik kembali menjadi tidak berlaku. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 1) Apa alasan-alasan pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT oleh pengadilan? 2) Apakah PPAT bertanggung gugat atas dibatalkannya akta Hibah yang dibuatnya? Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis alasan-alasan pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT oleh pengadilan dan tanggung gugat PPAT atas dibatalkannya akta Hibah yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *pertama*: alasan-alasan akta hibah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, disebabkan syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, antara lain dilanggarnya larangan hibah dan tidak terpenuhinya kecakapan/kewenangan penghibah atas benda hibah. *Kedua* dibatalkannya akta Hibah karena adanya cacat hukum, PPAT yang membuat akta hibah dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dengan dalil wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: hibah, tanah, dibatalkan

Abstract

Legal acts of grants regarding land carried out by individuals can be used as the basis for the transfer of land rights. In the grant there is an irrevocable element, but this is not an absolute thing because in certain circumstances the irrevocable element becomes invalid. The problems studied in this study 1) What are the reasons for the cancellation of the grant deed made before the PPAT by the court? 2) Is PPAT responsible for the cancellation of the grant deed it made? The purpose of this study is to examine and analyze the reasons for the cancellation of the grant deed made before the PPAT by the court and the PPAT's responsibility for the cancellation of the grant deed it made. The research method used in this research is normative juridical, the approach method used is the statutory regulation approach and the conceptual approach as well as the case approach. From the results of the research and discussion, it can be concluded first: the reasons for the deed of the grant being canceled based on the court's decision, because the conditions for the validity of the agreement were not fulfilled, among others, the violation of the prohibition on grants and the non-fulfillment of the skills/authority of the grantor on the object of the grant Second, the cancellation of the grant deed due to a legal defect, the PPAT who made the grant deed can be sued to provide compensation on the grounds of default and/or unlawful acts

Keywords: grant, land, canceled